

REFORMULASI WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Ramdhan Dwi Saputro, Dr. Lucky Endrawati, SH. MH., Dr. Nurini Aprilianda, SH.M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Ramdhands@yahoo.com

ABSTRAK

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) sangat mendukung peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi secara optimal, akan tetapi wewenang penyelidikan, penyidikan sampai tahap penuntutan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Korupsi tidak diikuti pengaturannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU TPPU hanya terbatas pada penyidikan tindak pidana asal saja, padahal antara Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, selain itu Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang lebih berkembang dari Tindak Pidana Korupsi karena adanya proses penghilangan alat bukti dan menjadikan bukti berupa harta kekayaan yang berasal dari korupsi tersebut menjadi sah, jika dalam Tindak Pidana Korupsi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi saja sistematis dari penyelidikan, penyidikan sampai tahap penuntutan, maka seharusnya wewenang yang sama juga diatur dalam UU TPPU khusus pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Korupsi. UU KPK dan UU TPPU adalah satu kesatuan sistem perundang-undangan yang saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri-sendiri sehingga memahami pengaturannya harus sistematis dan tidak terpisah.

Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

Authority of Corruption Eradication Commission which is set in the Legislation of Corruption Eradication Commission is very supportive of the role of the Corruption Eradication Commission in eradicating corruption optimally, but authorized the inquiry, the investigation to the prosecution stage owned by the Corruption Eradication Commission in dealing with the criminal acts of corruption do not follow the settings in the Legislation of Money Laundering Crime. Setting up the authority of the Corruption Eradication Commission in the Legislation of Money Laundering Crime is limited to the original crime investigation course, whereas among the criminal acts of Corruption which is the origin of the criminal offence of money laundering crime acts they have linked with one another, besides money laundering crime is a crime more

developed of corruption criminal proceedings due to the evidence and disappearance of the estate renders evidence derived from corruption is a legitimate, if in corruption of crime authority Corruption Eradication Commission systematic course of inquiry, investigation and prosecution phase, then it should have the same authority also arranged in special Legislation of Money Laundering Crime on the money laundering a criminal offence were originally derived from criminal acts of corruption. Legislation of Corruption Eradication Commission and Legislation of Money laundering Crime is a unified system of legislation that are related and not standing individually so as to understand its settings should be systematic and not separate.

Keywords : Corruption Eradication Commission, Money Laundering Crime

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari hukum pidana khusus yang memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dari hukum pidana umum seperti adanya perbedaan dalam ketentuan hukum acaranya.¹ Proses penyidikan tindak pidana pada hukum pidana umum dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang memiliki tugas membuat surat berkas acara pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum.

Jaksa penuntut umum bertugas membuat surat dakwaan yang didasarkan pada berkas acara pemeriksaan dari penyidik dan kemudian dijadikan dasar penuntutan dalam persidangan. Proses penanganan pada tindak pidana umum dengan proses penanganan pada tindak pidana khusus tentu tidak sepenuhnya sama, terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang belum diatur pada aturan hukum umum yang kemudian diatur pada ketentuan hukum khusus. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan oleh Polisi maupun Jaksa, tetapi juga terdapat penegak hukum yang secara khusus dibentuk untuk menangani tindak pidana tersebut yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tertulis, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi lebih luas dan khusus.

Tindak Pidana Korupsi yang dapat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki batasan nilai kerugian keuangan Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c UU KPK dimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6

¹ Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus**, Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 284

huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000.

Ketentuan yang diatur dalam UU KPK bertujuan untuk mengoptimalkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut agar pelaku yang sebenarnya dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara. Tahap penyelidikan sampai ketahap penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam satu rangkaian sistem beracara secara khusus, langsung dan sistematis dapat mempermudah proses pemeriksaan dan pengusutan secara optimal.

Kejahatan tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh di luar diri pelaku kejahatan, salah satunya dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak hanya memiliki dampak baik tetapi juga memiliki dampak yang buruk karena dapat dipergunakan pelaku kejahatan untuk menyamarkan uang hasil dari kejahatan serta menjadikan uang yang berasal dari kejahatan tersebut menjadi uang yang sah. Proses penyamaran sampai tahap menjadikan uang hasil dari kejahatan sah tersebut dilakukan dengan cara memindahkan, menempatkan maupun menghibahkan harta dan kekayaan yang berasal dari kejahatan, dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi kepada pihak lain dengan tujuan agar alat bukti tidak dapat diketahui dan pelaku terbebas dari jeratan hukum. Tindakan yang dilakukan pelaku ini masuk kedalam unsur Tindak Pidana Pencucian Uang baik yang aktif yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menyembunyikan, menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan maupun yang tindakan pasif seperti menerima dan menguasai harta dan kekayaan yang patut diduga berasal dari kejahatan.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang hanya terbatas pada tahap penyidikan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang tertulis:

“Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”

Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidananya berasal dari Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang saling berhubungan dan terdapat dalam satu rangkaian tindak kejahatan, selain itu dasar hukum pengaturan dan penanganan tindak pidana tersebut juga merupakan satu kesatuan sistem perundang-undangan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga kedua tindak pidana tersebut seharusnya dapat ditangani secara langsung dan khusus dalam satu rangkaian proses beracara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dari penyelidikan sampai ketahap penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa adanya pelimpahan berkas acara pemeriksaan kepada Jaksa selaku penuntut umum seperti yang termuat dalam hukum acara pada hukum pidana umum.

Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana khusus yang dalam penanganannya membutuhkan keahlian yang khusus serta oleh penegak hukum yang khusus dibentuk menangani perkara tersebut, namun UU TPPU maupun undang-undang di luar UU TPPU tidak mengatur wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan pada perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan dilain sisi terdapat asas legalitas yang mengharuskan penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum itu sendiri, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat melakukan penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang sebelum ketentuan melakukan penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diatur, maka agar ketentuan tersebut diatur perlu dilakukan Reformulasi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan pada perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Korupsi agar tidak terdapat celah hukum dalam penegakannya.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa urgensi pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana reformulasi pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi?

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif tentu tidak dapat dipisahkan dengan meneliti peraturan-peraturan hukum yang masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut merupakan permasalahan yang harus ditangani dengan meneliti peraturan yang berkaitan dengan substansi yang diteliti. Terdapat berbagai macam bentuk penelitian, salah satunya menurut Soerjono Soekanto penelitian preskriptif. Penelitian Preskriptif ialah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan solusi yang dengan solusi itu permasalahan dapat diatasi.² Penelitian preskriptif menurut Peter Mahmud Marzuki ialah ilmu yang mempelajari tentang norma hukum serta standart prosedur dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.³ Pendapat tersebut berkaitan dan memiliki hubungan yang dapat dijelaskan bahwa permasalahan hukum yang terjadi tidak hanya terdapat pada hukum materilnya saja tetapi dimungkinkan terjadi pada hukum pidana formilnya, baik dari segi wewenang dalam melakukan tindakan hukum oleh penegak hukum, maupun batasan seberapa jauh penegak hukum dapat bertindak. Penelitian ini menggunakan beberapa bentuk pendekatan yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian serta juga membahas tentang dasar pertimbangan, landasan filosofis dan ratio legis dari undang-undang yang diteliti.⁴ Berdasarkan apa yang sudah dikemukakan sebelumnya, tentu penelitian ini dilakukan dengan meneliti peraturan yang berkaitan dengan dasar wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani TPPU yang berasal dari TPK

2. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah merupakan proses pencarian sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu yang didalamnya dapat diketahui landasan filosofi dari adanya perkembangan dan perubahan hukum itu sendiri.⁵ Proses pencarian tersebut dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu yang mengatur tentang hal tertentu yang diteliti.

² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 10

³ Peter Mahmud Marzuki . *loc.cit.*, Hal. 22

⁴ *Ibid.*, Hlm. 102

⁵ *Ibid.*, Hlm. 126

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Konsep memiliki fungsi yang menarik baik dari sudut pandang praktis maupun dari sudut pandang pengetahuan dan dari konsep tersebut dapat menggabungkan kata-kata tertentu dengan obyek yang diteliti.⁶ Konsep dalam penelitian ini yaitu “memperluas wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi” yang ditujukan untuk mempermudah penanganan tindak pidana dengan menitik beratkan pada proses yang sederhana untuk mendapatkan hasil yang optimal agar dimasa yang akan datang kejahatan dapat dicegah maupun diberantas dengan baik.

Pendekatan konseptual akan membahas pula tentang ideal hukum dan realitas hukum. Menurut Donald Black, Ideal hukum ialah kaidah hukum yang dirumuskan kedalam undang-undang dan realitas hukum ialah tindakan nyata yang sesuai dengan hukum.⁷ Realitas hukum dengan ideal hukum tentu tidak boleh bertentangan dan harus sejalan, oleh karena itu sebelum diberlakukan hukum harus dibentuk dengan mempertimbangkan situasi yang ada terlebih dahulu, sehingga nilai ideal yang terkandung dalam hukum dapat dirumuskan secara baik dan ketika diberlakukan tidak bertentangan dengan tujuan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan penelitian dan disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 74 dan Pasal 75 UU TPPU
4. Pasal 6 Huruf c, Pasal 7, Pasal 11 Huruf c dan Pasal 39 ayat (3) UU KPK

⁶ *Ibid.*, Hlm. 306

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, Hlm. 137

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* Hlm. 141

5. Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 huruf a, Pasal 14 Huruf b, Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat (2), Pasal 109 ayat (1), Pasal 109 ayat (2), Pasal 109 ayat (3), Pasal 110 ayat (1), Pasal 110 ayat (2), Pasal 110 ayat (3), Pasal 140 ayat (2) huruf c, Pasal 143 ayat (4) dan Pasal 144 ayat (3) KUHAP

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer baik berupa pendapat para pakar atau doktrin tertentu maupun dari Peraturan Perundang-Undangan itu sendiri.⁹ Bahan hukum sekunder didapat melalui studi kepustakaan atau literatur.

Teknik memperoleh bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Klasifikasi ketentuan perundang-undangan tersebut dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian agar ruang lingkup penelitian tidak keluar dari batasan penelitian yang diteliti.¹⁰ Bahan hukum yang sudah ada diklasifikasikan dan disusun secara sistematis kedalam penelitian. Bahan hukum tersebut diteliti sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan menggunakan interpretasi sistematis yang menafsirkan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang saling berkaitan dan bukan berdiri sendiri-sendiri.¹¹ Penelitian dilakukan terhadap sistem penegakan hukum yang bertujuan akan mempermudah penegak hukum dalam menjalankan perannya secara sistematis dan konsisten kedepan.¹²

Proses selanjutnya setelah melalui metode penelitian yaitu menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam huruf b jurnal ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa urgensi Pengaturan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Pada TPPU yang Berasal dari TPK ?

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penanganan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c UU KPK yang tertulis Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan wewenang yang luas dan khusus

⁹ *Ibid.*, Hlm.119

¹⁰ Soerjono Sokanto, *op.cit.* Hlm. 255

¹¹ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm. 58

¹² Soerjono Soekanto, *loc.cit.* Hlm. 255

tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengoptimalkan pemberantasan Korupsi, hal tersebut didukung dengan pejabat yang menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari orang-orang pilihan yang berkualitas dari instansi Polisi dan Jaksa, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK yang tertulis penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Polisi dan Jaksa selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kualitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyidikan maupun penuntutan sangat baik karena unsur penyidik serta penuntut umum yang ada didalam Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dimiliki instansi penegak hukum yang lain meskipun Polisi dan Jaksa yang jabatan awalnya sebagai penyidik Polisi atau Jaksa penuntut umum, tetapi setelah menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berganti jabatan menjadi penyidik dan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengaturan wewenang yang khusus dan sistematis serta didukung dengan penegak hukum yang berkualitas dapat memberikan kemudahan penegak hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dan hal tersebut sudah diatur dalam UU KPK.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam UU KPK sangat mendukung peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi secara optimal, akan tetapi wewenang penyelidikan, penyidikan sampai tahap penuntutan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Korupsi tidak diikuti pengaturannya dalam UU TPPU. Pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU TPPU hanya terbatas pada penyidikan tindak pidana asal saja, padahal antara Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, selain itu Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang lebih berkembang dari Tindak Pidana Korupsi karena adanya proses penghilangan alat bukti dan menjadikan bukti berupa harta kekayaan yang berasal dari korupsi tersebut menjadi sah, jika dalam Tindak Pidana Korupsi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi saja sistematis dari penyelidikan, penyidikan sampai tahap penuntutan, maka seharusnya wewenang yang sama juga diatur dalam UU TPPU khusus pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Korupsi. UU KPK dan UU TPPU

adalah satu kesatuan sistem perundang-undangan yang saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri-sendiri sehingga memahaminya harus sistematis dan tidak terpisah.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 74 UU TPPU ialah sebagai peyidik dari tindak pidana asal, proses pengusutan harta dan kekayaan yang diduga berasal Tindak Pidana Korupsi membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang utuh untuk menyelidiki sumber uang, proses transaksi, pelaku yang terlibat serta dalam menentukan kerugian keuangan Negara dan pelaku sebenarnya, maka berdasarkan Pasal 75 UU TPPU tertulis proses penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi dapat digabungkan.

Penggabungan penyidikan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi juga harus sistematis dan sinergi dengan penyidikan dan penuntutan yang seharusnya dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Korupsi, karena esensi dan urgensi dari hal tersebut ialah proses pemeriksaan dan pengusutan harta dan kekayaan dari pelaku kejahatan agar optimal, apabila penyidikan dan penuntutan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dapat dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara sistematis, maka proses penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam sidang pengadilan lebih berkualitas dan pengusutan harta kekayaan yang akan disita guna mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian Negara dapat dilakukan secara benar dan pasti. Ketentuan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi baik yang diatur dalam UU KPK, UU PTPK maupun UU TPPU tidaklah diartikan secara sendiri-sendiri melainkan satu kesatuan sistem hukum yang saling berhubungan dan tidak terpisah.

Tindak pidana khusus yang bersifat kejahatan luar biasa tidak cukup dilakukan dengan penanganan biasa seperti penanganan kejahatan konvensional pada umumnya yang melimpahkan berkas perkara dari penyidik pada jaksa penuntut umum, tetapi juga harus dengan upaya yang lebih khusus serta mendalam, apabila wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi pada penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya terbatas pada penyidikan yang hanya membuat berkas acara pemeriksaan kemudian diserahkan kepada Jaksa penuntut umum, maka proses seperti ini justru memperumit

dan dapat menimbulkan celah hukum, sedangkan dilain sisi Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi harus segera ditangani guna menentukan pelaku dan jumlah kerugian keuangan Negara. Proses penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang rumit tersebut dapat dilihat dari penjelasan berikut:

- a. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8, Pasal 14 huruf a dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP)
- b. Penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik (Pasal 14 huruf c dan Pasal 24 ayat (2) KUHAP)
- c. Dalam hal penuntut umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuknya dan penyidik wajib melengkapinya dengan melaksanakan penyidikan tambahan (Pasal 14 huruf b dan Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP)
- d. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan/pemeriksaan, memberitahukan hal kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)
- e. Dalam hal penyidikan menghentikan penyidikan, pemberitahuan hal itu kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP), Sebaliknya dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan ia memberitahukan turunan surat ketetapan kepada penyidik (Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP)
- f. Penuntut umum memberitahukan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan kepada penyidik (Pasal 143 ayat (4) KUHAP), demikian pula dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia memberikan turunan perubahan surat dakwaan kepada penyidik (Pasal 144 ayat (3) KUHAP).¹³

Proses penanganan ini tentu dapat dilakukan pada kejahatan konvensional tetapi berbeda dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi karena dalam menentukan pelaku, nilai kerugian keuangan Negara, pengusutan harta dan kekayaan pelaku yang diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi bukan proses yang mudah dan jika dilakukan seperti penanganan kejahatan konvensional maka proses pengusutan yang rumit ini diperumit lagi dengan proses

¹³ Chaerudin, Syaiful Ahmad, Syarif Fadillah, **Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Refika Adhitama, Bandung, 2008, Hlm. 123

beracaranya yang dapat menimbulkan celah hukum, oleh karena itu sudah seharusnya wewenang penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi diatur dalam UU TPPU.

2. Bagaimana Reformulasi pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi ?

Sebelum membahas tentang reformulasi konsep pengaturan wewenang KPK, maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang *Grand Wetren Theory* yang mengemukakan tentang teori klasik dan teori modern dalam tujuan hukum. Teori klasik pada tujuan hukum menjelaskan tentang 3 tujuan hukum yaitu hukum untuk keadilan, hukum untuk kemanfaatan dan hukum untuk memberikan kepastian hukum sedangkan dalam teori modern, tujuan hukum dibagi menjadi 2 bagian, bagian yang pertama terdapat teori prioritas baku dimana mengutamakan keadilan setelah itu kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum, bagian yang kedua, Teori prioritas kasuistik dimana tujuan prioritas disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan tidak semata-mata baku seperti teori sebelumnya.¹⁴ Merumuskan wewenang penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi tentu melihat prioritas tujuan mana yang ingin dicapai, menurut penulis prioritas utama perumusan wewenang penuntutan tersebut ialah kepastian hukum agar kedudukan hukum setiap orang sama dan tidak dibeda-bedakan karena sudah terdapat peraturan yang pasti, namun dengan prioritas tersebut tidak dibenarkan untuk menyampingkan tujuan hukum yang lain. Perumusan substansi hukum yang dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum juga harus didasarkan pada kemanfaatan apa yang akan dicapai, seperti kemanfaatan dalam proses beracara yang sederhana dan tidak rumit yang dilakukan aparaturnya penegak hukum dalam menangani perkara demi tercapainya hasil yang optimal, selain itu juga harus dicantumkan pula esensi kemanfaatan dalam bentuk kebahagiaan yang besar bagi masyarakat. Berikutnya ialah tentang keadilan.

Parameter ukur tentang keadilan tentu tidak mudah untuk dijelaskan karena pandangan setiap orang yang didasarkan atas pemikirannya sendiri tentu berbeda-beda,

¹⁴ Achmad Ali, **Teori Hukum dan Teori Peradilan**, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm. 213

terdapat pandangan bahwa keadilan ialah ketentuan yang sudah dibuat oleh Negara didalam hukumnya, ada pula yang mengemukakan bahwa keadilan merupakan suatu proses yang tak pernah terselesaikan tetapi merupakan proses yang terdapat dalam diri setiap individu, namun Algra mengemukakan tentang apa itu adil tergantung pada pandangan setiap orang terhadap apa yang ditafsirkannya secara pribadi, dan menurutnya tidaklah mengatakan itu adil melainkan saya anggap adil dalam melihat keadilan.¹⁵ Keadilan tentu tidak terlepas dari prinsip persamaan kedudukan didepan hukum dimana penghukuman bagi para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi tetap dilakukan tanpa melihat kedudukan pelaku, manfaat yang lain ialah ketika para pelaku dapat dijerat hukum maka kerugian keuangan dan perekonomian Negara juga dapat dikembalikan kenegara melalui penyitaan harta dan kekayaan pelaku yang diduga didapat dari Tindak Pidana Korupsi. Kesejahteraan dapat dicapai ketika tujuan hukum tersebut dijadikan sebagai acuan yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi yang diatur dalam hukum itu sendiri. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa Undang-undang dibentuk harus berdasarkan cerminan keadilan masyarakat dan dengan itu kemanfaatan untuk memberikan kebahagiaan yang besar dapat dicapai.¹⁶ Apabila tujuan hukum sudah ditentukan secara benar dan pasti maka substansi yang diatur juga akan menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Hukum dibentuk untuk menanggulangi kejahatan, sehingga perumusannya harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat ini maupun yang akan datang. Proses pembentukan hukum dapat dilakukan melalui beberapa sarana salah satunya melalui kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), kebijakan tersebut tidak begitu saja dilakukan terhadap berbagai bentuk tindak pidana tetapi dilakukan hanya pada tindak pidana tertentu yang dirasakan perlu dilakukan pengaturan yang baru, proses yang dilakukan memiliki beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif)
2. Tahap Aplikatif (Kebijakan Yudikatif)
3. Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif).¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 222

¹⁶ Abdul Manan, **Aspek-Aspek Perubahan Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm, 17

¹⁷ Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm. 79

Melihat dari tahap-tahap diatas menunjukan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya terbatas pada tugas penegak hukum saja melainkan merupakan tugas dari lembaga legislatif melalui wewenangnya dalam membuat hukum agar merumuskan ketentuan sesuai dengan kebutuhan yang ada baik dimasa ini maupun dimasa yang akan datang. Istilah lain yang berkaitan dengan perubahan hukum tidak hanya terbatas pada kebijakan hukum pidana tetapi memiliki cakupan yang lebih luas seperti reformasi hukum dimana pembahasannya mencakup hal-hal yang tidak terbatas pada pembentukan dan pelaksanaan hukum tetapi juga membahas tentang reformasi dibidang kebudayaan hukum, pengetahuan hukum dan reformasi dibidang aparatur penegak hukum yang merupakan satu kesatuan sistem yang saling berhubungan atau membangun hukum yang baru.¹⁸ Istilah dari kebijakan hukum dan reformasi hukum memiliki arti yang luas maka peneliti menggunakan istilah formulasi hukum yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang atau hanya terbatas pada perumusan ketentuan dan substansi yang akan diatur dalam suatu undang-undang sesuai dengan situasi dan kondisi baik sekarang(*ius constitutum*) maupun yang akan datang(*ius constituendum*).¹⁹

Reformulasi wewenang KPK dalam penelitian ini dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan yang terjadi dalam proses penanganan TPPU yang berasal dari TPK agar tidak terdapat celah hukum yang dapat menyebabkan terbebasnya pelaku dari jeratan hukum. Kebijakan formulasi perundang-undangan (*Legislative Policy*) yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement Policy*) karena apabila tidak disesuaikan akan berpengaruh pada proses penanganan perkara yang kurang optimal oleh penegak hukum. Nils Jareborg, mengungkapkan yang dirancang dalam kebijakan formulasi dalam rumusan perundang-undangan salah satunya ialah mencakup struktur sistem hukum pidana dan pelaksanaan dari ketentuan pidana.²⁰ Artinya formulasi UU TPPU harus mengatur wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan pada TPPU yang berasal dari TPK dengan mempertimbangkan proses yang sederhana guna mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana tersebut. Proses sederhana yang dimaksud ialah

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 5

¹⁹ Lilik Mulyadi., *op.cit*, Hlm. 508

²⁰ Barda Nawawi., *op.cit*, Hlm. 75

pemahaman yang utuh mulai dari proses penyidikan sampai tahap penuntutan sangat dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani TPPU yang berasal dari TPK yang semata-mata dibutuhkan untuk mencapai hasil optimal, artinya tidak perlu ada pelimpahan wewenang penuntutan kepada kejaksaan karena dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda antara pemahaman Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan terhadap perkara yang ditangani yang dapat menimbulkan celah hukum yang nantinya akan berpengaruh pada proses penanganan perkara sedangkan kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang harus segera ditangani ataupun pelaku yang terbebas karena memanfaatkan celah dari pengaturan yang kurang optimal. Pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi secara ideal dalam UU TPPU dimasa mendatang tentu harus mengatur tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi, namun tetap tidak menghilangkan wewenang kejaksaan yang juga memiliki wewenang melakukan penuntutan karena sudah jelas pembagian wewenang tersebut bahwa Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi diatas Rp. 1.000.000.000 sehingga penuntutan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi tentu yang diatas Rp. 1 .000.000.000. Manfaat lainnya ialah hubungan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan selaku penuntut umum dapat berjalan dengan baik. Formulasi ini ditujukan untuk kebaikan tidak hanya baik dari sisi penegak hukum tetapi juga untuk masyarakat luas melalui pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan. Menurut Bentham, pembuat undang-undang dalam merumuskan substansi dalam undang-undang melibatkan temuan sarana untuk menciptakan kebaikan dan harus mempertimbangkan bahwa tindakan yang ingin dicegah ialah suatu keburukan.²¹

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

D.1.1. Urgensi pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana asal dari Tindak Pidana

²¹ Achmad Ali, *op.cit* Hlm. 78

Pencucian Uang yang saling berkaitan. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlaku saat ini dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 6 huruf c UU KPK ialah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, namun hal tersebut berbeda dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi, wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 74 UU TPPU hanya melakukan penyidikan, padahal dalam pasal 75 UU TPPU tertulis dapat dilakukan penggabungan penyidikan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi, maka idealnya proses penyidikan harus sinergi dan sistematis dengan proses penuntutan agar proses pengusutan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara optimal.

D.1.2. Reformulasi pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dilakukan melalui Kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap formulasi untuk merumuskan kembali wewenang penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi karena UU TPPU belum mengatur secara pasti penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Reformulasi tersebut ditulis pada bab penuntutan dalam UU TPPU dengan ketentuan “Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi”.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Reformulasi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan dapat termuat dalam bab penuntutan UU TPPU dimasa yang akan datang mengingat tujuan mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi menjadi hal utama dalam mengusut dan mengembalikan kerugian keuangan Negara. Proses pemberantasan tersebut dapat dijalankan dengan optimal ketika peraturan yang menjadi landasan penegak hukum dalam bertindak juga mendukung akan hal itu. Tujuan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera diwujudkan dengan tidak mengurangi wewenang dari Komisi Pemberantasan

Korupsi melainkan harus ada pengaturan yang lebih menjamin perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada sekarang.

E. DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

Abdul Manan, **Aspek-Aspek Perubahan Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009

Achmad Ali, **Teori Hukum dan Teori Peradilan**, Kencana, Jakarta, 2012

Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana, Jakarta, 2007

Chaerudin, Syaiful Ahmad, Syarif Fadillah, **Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Refika Adhitama, Bandung, 2008

Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus**, Alumni, Bandung, 2012

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986

Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2010, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5164

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4250

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3258

